



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: 4
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 19 Januari 2021
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 39 (tiga puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri RI C. Plt. Ketua KPU RI D. Ketua Bawaslu RI E. Ketua DKPP RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Plt. Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Ketua DKPP RI, dengan agenda evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, hari Selasa, 19 Januari 2021, dibuka pukul 10.10 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Plt. Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Ketua DKPP RI, dengan agenda evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, yaitu:

1. Pada tanggal 9 Desember 2020 KPU telah melaksanakan Pemilihan Serentak untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota. Pemilihan Serentak Tahun 2020 terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota, dengan rincian daerah yang melaksanakan pemilihan serentak tahun 2020 sebagai berikut:
 - a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota diselenggarakan pada 6 Provinsi, 36 Kabupaten dan 10 Kota;
 - b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota diselenggarakan pada 6 Provinsi, 36 Kabupaten dan 10 Kabupaten;
 - c. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, diselenggarakan pada 107 Kabupaten, dan 27 Kota;
 - d. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diselenggarakan pada 68 Kabupaten.
2. KPU sudah menghimpun jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 sebanyak 100.359.152 Pemilih.
3. Pada tahun 2021 masih terdapat tahapan pemilihan serentak tahun 2020 yang harus dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adapun tahapan yang masih harus dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi
 - b. Laporan hasil penyelenggaraan Pemilihan Serentak kepada DPR-RI, Pemerintah dan Badan Pengawas Pemilu
 - c. Evaluasi hasil Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada 270 Satker penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020
4. Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 secara umum seluruh tahapan berlangsung sukses, aman, tertib dan lancar. Meskipun dalam suasana Pandemi Covid-19, tetap mampu mencapai target dengan tingkat Partisipasi Pemilih sebesar 76.09 %.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Plt. Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Ketua DKPP RI, dengan agenda evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI, Partai Politik, Pasangan Calon, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan RI, Tentara Nasional Indonesia, Satgas Penanganan Covid-19 dan seluruh masyarakat Indonesia yang telah ikut berperan dan berpartisipasi dalam mendukung terselenggaranya Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Serentak tanggal 9 Desember 2020 yang dapat dinilai sukses.
2. Mencermati pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, Komisi II DPR RI menilai masih perlu dilakukan evaluasi, diantaranya:
 - a. Masih terdapat pelanggaran dan sengketa Pilkada.
 - b. Masih adanya indikasi praktik Politik Uang (*Money Politic*).
 - c. Masih ditemukan permasalahan dalam Daftar Pemilih Tetap.
 - d. Pelanggaran Netralitas ASN, Polri/TNI.
 - e. Lemahnya komunikasi dan koordinasi antar Penyelenggara Pemilu.

Untuk menindak lanjuti permasalahan Pilkada Serentak Tahun 2020 diatas, Komisi II DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.25 WIB.

Jakarta, 19 Januari 2021

KETUA RAPAT


H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
A-270